BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Pasal 4 Ayat (2) d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih menjadi dasar tuntutan terhadap pelaku prostitusi melalui media elektronik. Pasal tersebut diyakini saat ini yang dapat menjerat pelaku tindak kejahatan trsebut dikarenakan, prostitusi iu sendiri belum ada satu pun pasal baik dalam KUHP maupun lex specialis. Pelaku prostitusi melalui media elektronik dikenakan Pasal 4 Ayat (2) d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena mentransmisikan konten pornografi serta mengiklankan layanan seksual.
2. Upaya pencegahan hukum yang dilakukan oleh Polda Kepri mengenai tindak pidana pornografi melalui media elektronik belum efektif yang mengakibatkan masih banyak ditemui kejahatan-kejahatan cyberporn. Belum efektifnya pencegahan cyberporn tersebut tidak hanya disebabkan dari kurangnya sosiaisasi, induksi dan tindakan-tindakan represif lainnya dari pihak

Kepolisian akan tetapi juga disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet dengan bijak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Derah Kepulauan Riau seharusnya menambahkan sumber daya manusia serta usaha pengawasan yang intens terhadap penggunaan internet dan sosial media untuk menekan pertumbuhan cyberporn dan prostitusi online di Kota Batam pada khususnya.
2. Menambahkan anggaran pembiayaan terhadap terhadap penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang penyidikan maupun penyelidikan terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya cyberporn.
3. Memberikan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat terkait penggunaan internet dengan lebih positif.